



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKJIP )**

**KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiq yang diberikan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Praya dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Praya merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Praya Tahun 2021-2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Praya Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Praya.

Kinerja Kecamatan Praya diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Praya Tahun 2023. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

---

LKJIP Kecamatan Praya

Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Praya Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Praya pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan mendukung good government dan clean government.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga masukan yang membangun untuk perbaikan kedepannya sangat kami harapkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta upaya peningkatan kinerja bagi seluruh staf Kantor Camat Praya.

Praya, Januari 2024

**CAMAT PRAYA,**



**BAIQ MURNIATI, S.Sos**

NIP. 197405081993112001

---

LKJIP Kecamatan Praya

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	

### BAB I PENDAHULUAN

1.1..... Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	1
1.2..... Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	4
1.3..... Sumber Daya Aparatur .....	18

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	22
II.2. Rencana Kerja Tahunan.....	24
II.3. Indikator Kinerja Utama.....	25
II.4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 .....	27

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	37
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah.....	38
III.2.1 Sasaran 1 .....	39
III.2.2. Sasaran 2.....	39
III.2.3. Sasaran 3.....	40
III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian tujuan strategis perangkat Daerah.....	40

### BAB IV PENUTUP .....

42

### LAMPIRAN.....

1. DAFTAR PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH  
OPD TAHUN 2023;

LKJIP Kecamatan Praya



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Camat Praya Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Praya Tahun 2021-2026. LKJIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Praya menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan visi dan misi, Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah, menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja yang merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Praya. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

LKJIP Kecamatan Praya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas layanan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B	B	
	Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan	85	85	100
	Nilai Kinerja Camat	100	100	100
	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100	100	100

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik. Kantor Camat Praya sebagai sebuah SKPD melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka memaksimalkan tugas dan tugas pokok dan fungsi, telah ditetapkan target kinerja setiap tahun, sebagai acuan sekaligus indikator keberhasilan sebuah SKPD dalam melaksanakan tugasnya dalam masa satu tahun anggaran.

Pada tahun 2023 Kantor Camat Praya telah berupaya maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan, namun dalam pelaksanaan kegiatan banyak dihadapkan dengan berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Hal ini menyebabkan adanya program yang tidak mencapai target. Hambatan atau kendala

LKJIP Kecamatan Praya

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 TUGAS, FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana teknis kewilayahan, memiliki wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggungjawab dibawah Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Selain itu Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### **a. Letak Geografis**

Kecamatan Praya merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Terletak antara 115<sup>o</sup>46-119<sup>o</sup>05 bujur timur dan 08<sup>o</sup>10-09<sup>o</sup>05 lintang selatan. Dengan luas wilayah mencapai 6.126 ha atau 5.13% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan berada pada urutan ke-9 dalam hal luas wilayah dari 12 kecamatan yang ada.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1996, tentang lambing dan motto daerah kabupaten daerah tingkat II Lombok Tengah, Motto Kecamatan Praya adalah "SILAK NYAMBANG" Bersih dan Elok Kotanya Nyaman dan Bahagia Warganya.

#### **b. Tata Letak dan Wilayah Administrasi Kecamatan Praya**

sebagai kecamatan yang sekaligus menjadi tempat ibukota kabupaten maka Kecamatan Praya memiliki jumlah Kelurahan terbanyak yakni sebanyak 9 Kelurahan yaitu Kelurahan Praya, Prapen, Leneng, Gerunung, Tiwugalih, Semayan,

Panjisari, Renteng dan Gonjak. Selain itu terdapat juga Desa sebanyak 6 yakni Aikmual, Mertak Tombok, Montong Terep, Jago, Bunut Baik dan Mekar Damai, sehingga secara administrasi terbagi menjadi 15 Desa/Kelurahan,

Jarak antara ibukota Kecamatan dengan ibukota Kelurahan terdekat mencapai 5 km, sedangkan jarak dengan ibukota terjauh mencapai jarak 10 km.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Praya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Batukliang
- Sebelah Timur : Kecamatan Kopang dan Kecamatan Praya Tengah
- Sebelah Selatan : Kecamatan Praya Barat
- Sebelah Barat : Kecamatan Jonggat

### **c. Kondisi Demografi**

Jumlah penduduk Kecamatan Praya berdasarkan data sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sebanyak 134.635 jiwa orang terdiri dari 66.727 jiwa laki-laki dan 67.908 jiwa perempuan dengan karakteristik penduduk yang pluralism terdiri dari berbagai agama dan etnis/suku yang hidup berdampingan dan saling toleransi. Penyebaran jumlah penduduk menurut Desa dan Kelurahan di Kecamatan Praya disajikan pada **Tabel 1.1**



**TABEL : 1.1**  
**Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah di Kecamatan Praya**

Desa/Kelurahan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
1	2	3	4
1. Kel. Praya	21	220	241
2. Kel. Leneng	458	80	538
3. Kel. Gerunung	255	57	312
4. Kel. Semayan	136	182	318
5. Kel. Prapen	7	390	397
6. Kel. Tiwugalih	18	303	321
7. Kel. Gonjak	247	55	302
8. Kel. Panji Sari	149	31	180
9. Kel. Renteng	340	63	403
10. Desa Mertak Tombok	256	66	322
11. Desa Aik Mual	294	92	386
12. Desa Montong Terep	363	125	488
13. Desa Jago	751	162	913
14. Desa Bunut Baik	500	241	741
15. Desa Mekar Damai	108	56	164
<b>Jumlah</b>	<b>3,903</b>	<b>2,123</b>	<b>6,026</b>

**TABEL : 1.3**  
**Persentase Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Praya**

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1. Kel. Praya	241	3,93
2. Kel. Leneng	538	8,78
3. Kel. Gerunung	312	5,09
4. Kel. Semayan	418	6,82
5. Kel. Prapen	397	6,48
6. Kel. Tiwugalih	321	5,24
7. Kel. Gonjak	302	4,93
8. Kel. Panji Sari	180	2,94
9. Kel. Renteng	403	6,58
10. Desa Mertak Tombok	322	5,26
11. Desa Aik Mual	386	6,30
12. Desa Montong Terep	488	7,97
13. Desa Jago	913	14,90
14. Desa Bunut Baik	741	12,10
15. Desa Mekar Damai	164	2,68
<b>Jumlah</b>	<b>6.126</b>	<b>100</b>

## JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PRAYA TAHUN 2023

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk	Persentase Kecamatan
1	Kelurahan Panjisari	4.146	3,03 %
2	Kelurahan Leneng	8.758	7,60 %
3	Kelurahan Renteng	5.952	4,37 %
4	Kelurahan Praya	11.451	11,66 %
5	Kelurahan Prapen	13.005	10,95 %
6	Kelurahan Tiwugalih	13.497	9,61 %
7	Kelurahan Semayan	5.843	4,71 %
8	Kelurahan Gerunung	6.432	4,79 %
9	Kelurahan Gonjak	5.861	4,00 %
10	Desa Bunut Baik	11.892	8,27 %
11	Desa Jago	15.920	8,28 %
12	Desa Aikmual	5.492	3,55 %
13	Desa Mertak Tombok	7.012	6,58 %
14	Desa Montong Terep	11.850	9,10 %
15	Desa Mekar Damai	7966	4,54 %

### 1.2 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan juga mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seorang Camat dibantu oleh perangkat kecamatan berdasarkan penjabaran Tugas Pokok Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Praya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah

Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Praya adalah sebagai berikut:

1. Camat

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Dalam menjalankan tugas, Camat menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan dan penetapan rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan.
- Penyusunan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.



- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.
- Penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik Daerah/Negara, rumah tangga, dan penatausahaan Kecamatan.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Kecamatan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

## 2. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengeloaan pelayanan kesekretariat yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Dalam menjalankan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Sekretariat Kecamatan.
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan rencana strategis, program kerja, kegiatan dan anggaran Kecamatan.
- c. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian penyusunan bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasin Keuangan.



- e. Pengkoordinasian penyiapan bahan rencana produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan meliputi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- g. Pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Kecamatan.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sekretariat.
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat dibantu :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan aset, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. Dalam menjalankan tugas, SubBagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kegiatan SubBagian Perencanaan dan Keuangan.
- b) Penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan program/rencana kerja tahunan, dan penetapan Kinerja Kecamatan.

- c) Penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan.
- d) Penyiapan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan kecamatan.
- e) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tidak langsung serta belanja langsung.
- f) Pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- g) Pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya.
- h) Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- i) Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- j) Penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan konsep Surat Keputusan Camat tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara.
- k) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan.

- l) Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja.
- m) Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n) Penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta inventaris dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbag Perencanaan dan Keuangan.
- p) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Perencanaan dan Keuangan.
- q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sub bagian umum dan kepegawaian**

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Dalam menjalankan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat menyurat, dan alat tulis unit kerja.
- c) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan kecamatan.



- d) Pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional.
- e) Pelaksanaan fasilitas penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belajar.
- f) Pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi: usul kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah\janji pegawai, usul kebutuhan formasi, mutasi\penempatan staf, pembinaan pegawai, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), usul pensiun, cuti dan registrasi kepegawaian.
- g) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor meliputi: kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan Kecamatan.
- h) Penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundangundangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi Kecamatan.
- j) Pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Kecamatan.
- k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbag Umum dan Kepegawaian.
- l) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Umum dan Kepegawaian.
- m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### 3. Seksi Pelayanan Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum berdasarkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat. Dalam menjalankan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum;
- b) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Survey Kepuasan masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- c) Pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan umum dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- d) Penyiapan penyelenggaraan pelayanan administrasi, legalisasi surat-surat keterangan, dan jenis pelayanan publik lainnya, sesuai kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat;
- e) Pelaksanaan penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas ajuan pendaftaran kependudukan sesuai kewenangannya;
- f) Pelaksanaan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten;
- g) Pelaksanaan pemberian rekomendasi pindah pindah penduduk dalam dan antar kabupaten;
- h) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- i) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- j) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan secara koordinatif untuk suksesnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

- k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan seksi Pelayanan Umum;
- l) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Umum;
- m) Pelaksanaan kedinasan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas dalam memimpin dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Dalam menjalankan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan;
- b) Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa / kelurahan;
- c) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa / Kelurahan;
- e) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- f) Pelaksanaan penyusunan, pendataan dan updating data potensi Desa / Kelurahan;
- j) Pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Desa/Kelurahan di lingkungan Kecamatan;
- k) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan;
- m) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Pemerintahan;
- n) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi pemerintahan;

o) Pelaksanaan kedinasan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 5. Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas dalam memimpin penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat-masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c) Pelaksanaan fasilitasi penataan Desa dan penyusunan Peraturan Desa;
- d) Pelaksanaan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- g) Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
- h) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- i) Pelaksanaan penyusunan, pendataan dan updating data potensi Desa;
- j) Pelaksanaan sosialisasi dan monitoring pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dilingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- l) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- m) Pelaksanaan kedinasan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.



## 6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat. Dalam menjalankan tugas, Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan upaya kesehatan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkungan sehatn, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan masyarakat.
- b) Pelaksanaan pasilitas dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, pembinaan dan pengawasan aktivitas kepemudaan sekala kecamatan.
- c) Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi dalam rangka penggalian pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan sumber kesejahteraan social (PSKS).
- d) Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran pengangulangan masalah social;
- e) Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak bboleh potensial terlantar dan berasal dari masyuarakat rentan dan tidak mampu;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program-program keagamaan meliputi pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan, Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), LASQI, Safari Ramadhan, Bulan Pesona Mandalika dan kegiatan-kegiatan lain guna mendukung even-even yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- g) Pelaksanaan pasilitas dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi orang miskin meliputi penyaluran, BPNT, PKH dan Bantuan social lainnya;
- h) Pelaksanan pendataan dan pemberian kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang meliputi santunan anak yatim dan terlantar, pembinaan karang taruna, wanita tuna Susila gelandangan dan pengemis;



- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dilingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

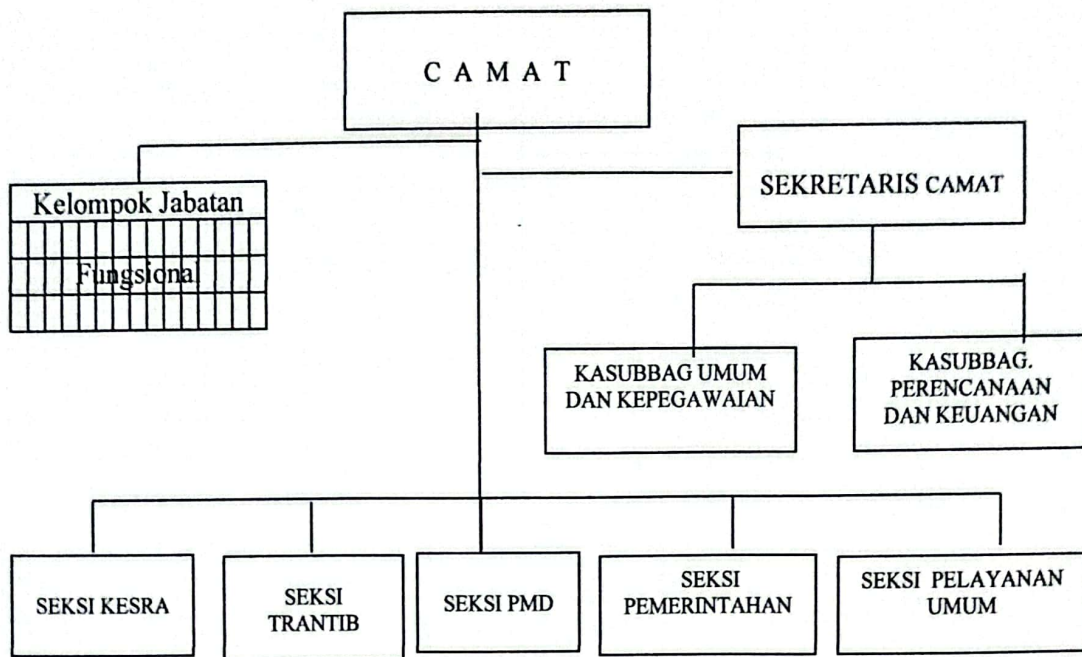
#### 7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam menjalankan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah social lainnya.

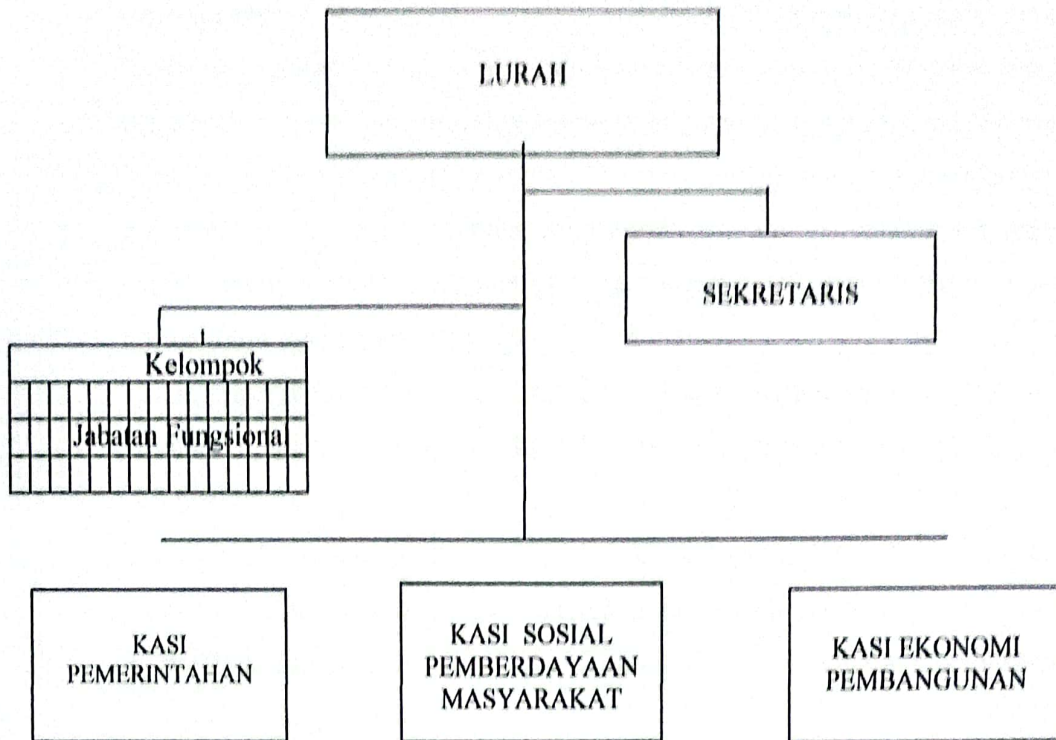
- h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi social kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi.
- i. Penyusunan laporan pelaksanaa kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- j. Pelaksanaan pasilitas dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan, pengembngan dan poemanpaatankebudayaan, pembinaan dan pengawasan aktivitas kepemudaan sekala kecamatan.
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanan tugas bawahan secara berkala dilingkungan Seksi Ketentranan dan Ketertiban Umum;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PRAYA





## STRUKTUR KELURAHAN



### 1.3 SUMBER DAYA APARATUR

Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kecukupan personil (SDM) pada organisasi tersebut, bukan hanya dilihat dari kuantitasnya saja akan tetapi juga dipandang dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Karena sebuah organisasi dengan kuantitas SDM yang cukup namun tidak dilandasi kualitasnya, maka roda organisasi tidak akan maksimal dalam operasionalnya.

Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Praya terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagai pelaku untuk mendukung pelaksanaan Program/kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan. Sampai saat ini Kecamatan sebagai SKPD dalam menjalankan fungsinya masih mendapat kendala/permasalahan yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kantor Kecamatan Praya antara lain :

1. Minimnya/keterbatasan Sumber Daya Manusia/Aparatur yang memiliki kemampuan teknis yang memadai sehingga penyerapan dan pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.
2. Masih adanya jabatan kosong dan belum ada pergantian di Seksi Pelayanan Umum karena pejabat yang lama telah memasuki masa pensiun.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan.
4. Sebagian besar tugas-tugas kasi/kasubag serta pelayanan umum kepada masyarakat di kantor camat praya masih sangat tergantung pada bantuan tenaga honorer sukarela dan PTT.

Jumlah Pegawai pada kantor camat praya adalah sebanyak 112 orang yang ada di kecamatan dan 9 Kelurahan. Jumlah tersebut belum termasuk pegawai honorer sukarela dan PTT sebanyak 145 orang. Jumlah tersebut merupakan tenaga pengadministrasi umum dan petugas sampah pada 9 kelurahan di Kecamatan Praya, terdiri dari 114 orang laki-laki dan 31 orang perempuan dengan pendidikan berjenjang yaitu : SD 17 orang, SLTP 26 orang, SLTA 68 orang, D III 2 orang dan S1 sebanyak 16 orang.

Dalam menjalankan fungsinya Kecamatan Praya masih terdapat kendala/permasalahan yang dihadapi. Pada tahun 2023 Kantor Camat Praya mengalami kekurangan pegawai negeri sipil pada sekretariat dan semua bidang/seksi. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan

tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki,

hal tersebut menyebabkan hampir disemua keglatan dan tugas kerja di semua seksi dan sub bagian sangat mengandalkan dan tergantung pada bantuan dari tenaga honorer dan PTT. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Praya antara lain :

1. Kondisi fisik bangunan Gedung kantor camat praya masih perlu di perbaiki sebagai tempat fasilitas jasa layanan umum.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan umum dikarekankan realokasi anggaran.
3. Sangat minimnya/keterbatasan Sumber Daya Manusia/aparatur yang memiliki kemampuan teknis yang memadai.

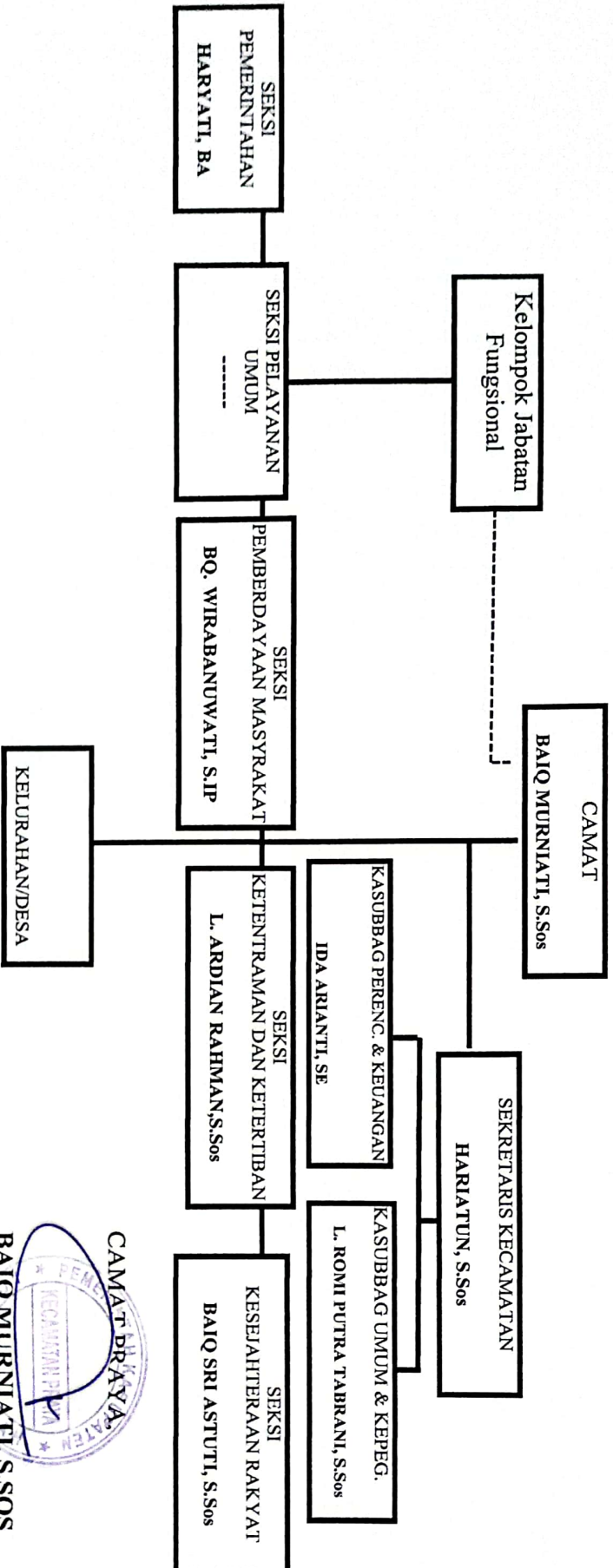
Selain sumber daya aparatur, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD harus didukung oleh sarana dan prasarana (aset), antara lain gedung kantor, perlengkapan kantor lainnya sebagai berikut :

Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Praya Tahun 2023



No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Gedung Kantor	1	Unit
2	Aula Gedung Kantor	1	Unit
3	Pos Jaga Satpol PP	1	Unit
4	Kendaraan Dinas Roda 4	1	unit
5	Kendaraan Dinas Roda 2	6	Unit
6	Komputer	4	Buah
7	Laptop	13	Buah
8	Printer	8	Buah
9	Kamera	1	Buah
10	LCD	1	Unit
11	AC	7	Buah
12	Meja Rapat	3	Buah
13	Kursi Rapat chetose	50	Buah
14	Meja Kerja	25	Buah
15	Kursi Kerja	25	Buah
16	Lemari Arsip	10	Buah
17	Kursi Plastik	32	Buah
18	Kipas Angin	4	Unit
19	Air Cooler	2	Unit
20	Meja Kursi Tamu	2	Set
21	Lemari Kaca/Display	2	Buah
22	Televisi	2	Buah
23	Sound System	1	Set
24	Wearles	1	unit

Bagan Struktur Organisasi Lengkap dengan Nama Pejabat Kantor Camat Praya Tahun 2023



CAMAT PRAYA  
 BAIQ MURNIATI, S.SOS  
 NIP: 19740508 199311 2 001

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### II.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Penyusunan perencanaan kinerja kecamatan merupakan suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintah dan pembangunan, baik di pemerintahan kecamatan sendiri maupun secara lintas sectoral. Perencanaan kinerja kecamatan tersebut mengacu pada perencanaan kinerja kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yang telah dibuat dan ditetapkan.

Kecamatan Praya memiliki tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lombok Tengah lima tahun kedepan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA). Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) Kantor Camat Praya merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam upaya mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi di atas, Kantor Camat Praya telah menyusun dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, yang diarahkan untuk mencapai visi dan misi dimaksud, Kecamatan Praya memiliki 2 misi yaitu :

misi ke 1 (satu) yaitu :

**“ Merawat Akhlaqul Karimah Dalam Kehidupan Bermasyarakat “**

dan misi ke 3 yaitu :

**“Pelayanan Umum Pemerintahan Yang Mudah, Cepat dan Bersih”.**

Agar Rencana strategis ini dapat bermanfaat dalam rangka kemajuan Daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Praya, program-program yang akan dilaksanakan mengacu pada Rencana strategis ini.



Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan 2 tujuan Kecamatan yang disebutkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Praya yaitu :

1. Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat
2. Meningkatnya Kinerja Kecamatan.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu dilantislpassi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

## II.2 RENCANA KERJA TAHUNAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2023, Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

	Program/Kegiatan	Keterangan
	<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b></p> <p>1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p>	
	<p><b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b></p> <p>1.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p>	

<p><b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b></p> <p>1.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>	
<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b></p> <p>1.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>	
<p><b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b></p> <p>5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	
<p><b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b></p> <p>6.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p>	

### **I.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Kecamatan Praya yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

lebih lengkapnya disajikan dalam table berikut :



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran tahun ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum	Persentase Penurunan Gangguang Trantibum	20%	20%	25%	30%	35%	35%
		Persentase Pengendalian Trantibum yang melibatkan masyarakat	75 %	75%	75%	75 %	75%	75%
		Persentase Pengendalian Trantibum yang melibatkan stake holder	75 %	75%	75%	75 %	75%	75%
Meningkatnya kinerja	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Poin	81 Poin	83 Poin	86 Poin	89 Poin	89 Poin

kecamatan	Meningkatnya kualitas Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Maju di Wilayah Kecamatan	83 %	83%	83%	100 %	100 %	100 %
-----------	---	---	------	-----	-----	-------	-------	-------

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik dapat diukur, dicapai dan relevan pada suatu kurun waktu tertentu yang menggambarkan terwujudnya kinerja tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan mandat (core business) yang diembannya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Praya Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Praya Tahun 2023 dengan realisasinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Praya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum
2. Nilai Kinerja Camat
3. Persentase Desa Maju diwilayah Kecamatan
4. Indeks Kepuasan Masyarakat
5. Persentase Pengendalian Trantibum yang melibatkan stakeholder
6. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan yang dilimpahkan
7. Persentase Layanan sesuai SOP
8. Persentase Desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu
9. Persentase usulan masyarakat yang di setujui
10. Persentase Pengendalian gangguan ketertiban masyarakat
11. Persentase urusan pemerintahan umum yang di koordinasikan

#### II.4 PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Praya Tahun 2023 disajikan sebagaimana table berikut :

**Table 2.1**  
**Perjanjian Kinerja**

URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Hasil Kegiatan Pencapaian Kinerja Seksi Pemerintahan	1 Dokumen
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	laporan hasil koordinasi pemerintahan umum	1 Dokumen



Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	1 Dokumen
	Profil kecamatan	1 Dokumen
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Seksi Pelayanan Umum	1 Dokumen
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan Penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 Dokumen
	Laporan Penyelenggaraan ADMINDUK	1 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Kinerja Seksi Pemberdayaan Desa	1 Dokumen
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Hasil Musrembang Kecamatan Desa	1 Dokumen
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pencapaian Kinerja Seksi Trantib	1 Dokumen

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanganan pengaduan masyarakat dan penanganan konflik	1 Dokumen
	Laporan Hasil Patroli Terpadu Kecamatan	1 Dokumen
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja seksi Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporan Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	1 Dokumen
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Seksi Pemerintahan	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Kelurahan Gonjak		

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan	1 Laporan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penataan drainase lingkungan	1 Paket
	Penataan jalan lingkungan	1 Paket
	RTLH	5 unit
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Laporan pelaksanaan kegiatan BKK	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 Dokumen
Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 Dokumen
	Laporan kinerja kelurahan	1 Dokumen
	Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 Dokumen
	Profil kelurahan	1 Dokumen
Kelurahan Semayan		



<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		
<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</b>	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan	1 Laporan
<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	Penataan drainase lingkungan	1 Paket
	Penataan jalan lingkungan	1 Paket
	RTLH	5 Unit
<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	Laporan pelaksanaan kegiatan BKK	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 Dokumen
<b>Evaluasi Kelurahan</b>	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 Dokumen
	Laporan kinerja kelurahan	1 Dokumen
	Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 Dokumen
	Profil kelurahan	1 Dokumen
<b>Kelurahan Tiwugalih</b>		

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan	1 Laporan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penataan drainase lingkungan	1 Paket
	Penataan jalan lingkungan	1 Paket
	RTLH	5 Unit
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Laporan pelaksanaan kegiatan BKK	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 Dokumen
Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 Dokumen
	Laporan kinerja kelurahan	1 Dokumen
	Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 Dokumen
	Profil kelurahan	1 Dokumen
Kelurahan Praya		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		

<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		
<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</b>	<b>Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan</b>	<b>1 Laporan</b>
<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>Penataan drainase lingkungan</b>	<b>1 Paket</b>
	<b>Penataan jalan lingkungan</b>	<b>1 Paket</b>
	<b>RTLH</b>	<b>5 Unit</b>
<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>Laporan pelaksanaan kegiatan BKK</b>	<b>1 Dokumen</b>
	<b>Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan</b>	<b>1 Dokumen</b>
	<b>Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu</b>	<b>1 Dokumen</b>
	<b>Laporan pelaksanaan kegiatan STQ</b>	<b>1 Dokumen</b>
<b>Evaluasi Kelurahan</b>	<b>Laporan evaluasi perkembangan kelurahan</b>	<b>1 Dokumen</b>
	<b>Laporan kinerja kelurahan</b>	<b>1 Dokumen</b>
	<b>Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan</b>	<b>1 Dokumen</b>
	<b>Profil kelurahan</b>	<b>1 Dokumen</b>
<b>Kelurahan Prapen</b>		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		



Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan	1 Laporan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penataan drainase lingkungan	1 Paket
	Penataan jalan lingkungan	1 Paket
	RTLH	5 Unit
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Laporan pelaksanaan kegiatan BKK	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 Dokumen
Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 Dokumen
	Laporan kinerja kelurahan	1 Dokumen
	Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 Dokumen
	Profil kelurahan	1 Dokumen
Kelurahan Leneng		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Peningkatan Partisipasi		

Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan	1 Laporan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penataan drainase lingkungan	1 Paket
	Penataan jalan lingkungan	1 Paket
	RTLH	5 Unit
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Laporan pelaksanaan kegiatan BKK	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 Dokumen
Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 Dokumen
	Laporan kinerja kelurahan	1 Dokumen
	Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 Dokumen
	Profil kelurahan	1 Dokumen
Kelurahan Gerunung		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Laporan Hasil Musrenbang	1 Laporan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penataan drainase lingkungan	1 Paket
	Penataan jalan lingkungan	1 Paket
	RTLH	5 Unit
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Laporan pelaksanaan kegiatan BKK	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 Dokumen
Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 Dokumen
	Laporan kinerja kelurahan	1 Dokumen
	Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 Dokumen
	Profil kelurahan	1 Dokumen
Kelurahan Panjisari		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan	1 Laporan



Pembangunan di Kelurahan		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penataan drainase lingkungan	1 Paket
	Penataan jalan lingkungan	1 Paket
	RTLH	5 Unit
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Laporan pelaksanaan kegiatan BKK	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 Dokumen
Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 Dokumen
	Laporan kinerja kelurahan	1 Dokumen
	Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 Dokumen
	Profil kelurahan	1 Dokumen
Kelurahan Renteng		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan	1 Laporan

Pembangunan di Kelurahan		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penataan drainase lingkungan	1 Paket
	Penataan jalan lingkungan	1 Paket
	RTLH	5 Unit
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Laporan pelaksanaan kegiatan BKK	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu	1 Dokumen
	Laporan pelaksanaan kegiatan STQ	1 Dokumen
Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	1 Dokumen
	Laporan kinerja kelurahan	1 Dokumen
	Laporan koordinasi pemerintahan kelurahan	1 Dokumen
	Profil kelurahan	1 Dokumen

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**III.1. SKALA PENGUKURAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Pengukuran akuntabilitas kinerja yang di gunakan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah adalah dengan menggunakan suatu matriks yang disebut dengan Pengukuran Kinerja berisikan sasaran, indikator sasaran, target, realisasi dan persentase pencapaian. Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Praya dapat disajikan dalam bentuk Tabel Pengukuran Kinerja Kecamatan Praya, yang menyajikan target tahun 2023 dan realisasi indikator sasaran tahun 2023. Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum	Persentase Pengendalian Trantibum yang melibatkan masyarakat	persen	75%	75%	75%
			Persentase Pendalian Trantibum yang				



			melibatkan stake holder				
		Meningkatnya kualitas layanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	81 Poin	81 Point	100%
	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Maju di wilayah Kecamatan	persen	83%	83%	100%

### III.2. EVALUASI KINERJA PENCAPAIAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator Sasaran strategis terhadap target hasil dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, atau konstan dalam melaksanakan program kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja.

Pengukuran tersebut perlu dianalisis dari capaian pelaksanaan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis tentang capaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan akhir masa Renstra diuraikan sebagai berikut:

### III.2.1. SASARAN 1

Sasaran strategis pertama kecamatan Praya sesuai adalah Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian seperti pada table berikut

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder	Persentase Pengendalian Trantibum yang melibatkan masyarakat	75	75	75	75	75	75
	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	75	75	75	75	75	75

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 1 (satu) Indikator 1 (satu) Persentase pengendalian Trantibum yang melibatkan masyarakat pada Tahun 2023 mencapai 75%. Realisasi indicator kinerja Persentase Pengendalian Trantibum yang melibatkan masyarakat pada tahun 2023 sebesar 75%. Jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya (Tahun 2022) realisasi kinerja adalah tetap dan sudah memenuhi target kinerja sebesar 100%.

### III.2.2 SASARAN 2

Sasaran strategis 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas layanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat	79	80	102	81	81	100

Indeks kepuasan masyarakat merupakan indicator yang cara mengukurnya dilakukan melalui survey kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 81 point. Mengalami kenaikan dari target dan realisasi pada tahun 2023 sebesar 0,26% .

### III.2.3 SASARAN 3

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Maju di wilyah Kecamatan	72	72	100	83	83	100



Dari table diatas dapat dilihat bahwa ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja indicator sebesar 100% artinya secara substansi memang adanya peningkatan desa maju di wilayah Kecamatan Praya.

### III.3 EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dapat di sajikan dalam bentuk table pengukuran kinerja Kecamatan Praya yang menampilkan Target tahun 2022 dan realisasi indikator sasaran tahun 2023 seperti dibawah ini :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2023		
			TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN KINER JA
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Persentase Penyelesaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	100	100
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum	Persentase pengendalian gangguan trantibum yang ditangani	75	75	100

	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	100	100	100
--	---	--	-----	-----	-----

Pengukuran kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai implementasi Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 36 tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, serta tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan yang dilaksanakan, yang berhasil mengarahkan program pembangunan untuk mencapai tujuan yang diamanatkan.

Dalam tahun 2023 Kantor Camat Praya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai perangkat daerah. Sangat disadari masih diperlukan perbaikan pada berbagai bidang untuk dapat meningkatkan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Praya dalam bentuk :

1. Perbaikan perencanaan dan estimasi serta penggunaan anggaran sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang ditunda atau ditangguhkan.
2. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, dan evaluasi karena koordinasi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan secara tepat waktu.
3. Penambahan sarana dan prasarana berupa peralatan kerja seperti komputer, mesin pencetak (Printer), mesin penggandaan serta pengadaan dan pemeliharaan kendaraan operasional akan sangat mempengaruhi kualitas kerja yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah yang bertugas di Kantor Camat Praya.
4. Diperlukan adanya peningkatan dalam sistem pengumpulan data sehingga setiap hasil/outcome dari kegiatan atau program yang dilaksanakan dapat terlihat dan



tergambarkan dalam setiap laporan hasil kegiatan/program yang akhirnya tercantum dalam laporan pertanggungjawaban kinerja Kantor Camat Praya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah kami sajikan dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Masukan dan saran serta petunjuk penyempurnaan merupakan harapan bersama agar bermanfaat bagi peningkatan kinerja pelayanan masyarakat di masa yang akan datang.



**BAIQ MURNIATI, S.Sos.**

NIP.: 197405081993112001